

## **Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Partai Gerindra dan PPP)**

**Firnanda Amdimas<sup>(1)</sup>, Jendrius<sup>(2)</sup>, Maihasni<sup>(3)</sup>**

Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email : [firnandaamdimas@gmail.com](mailto:firnandaamdimas@gmail.com), [jendrius@soc.unand.ac.id](mailto:jendrius@soc.unand.ac.id), [maihasni@yahoo.co.id](mailto:maihasni@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Melalui partai politik, kaum perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata di segala bidang khususnya dalam bidang politik, sehingga partai politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan partisipasi politik dan keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislative. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative tentu tidak terlepas dari upaya partai politik dalam memberdayakan kader perempuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik di provinsi Sumatera Barat. Metode kualitatif dengan tipe studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa partai politik, yakni Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan memberdayakan kader perempuannya dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan politik serta memberikan ruang penuh bagi kader perempuan untuk merumuskan kebijakan dan membuat kegiatan melalui organisasi sayap partai yang khusus mengurus kebutuhan perempuan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Kader perempuan, Partai politik

### **Abstract**

Through political parties, women can actually fight for their interests in all fields, especially in the political field, so that political parties become one of the important factors that can determine the political participation and representation of women in the legislative body. The representation of women in the legislative body is certainly inseparable from the efforts of political parties in empowering their female cadres. This study aims to examine the forms of women's empowerment carried out by political parties in the province of West Sumatra. Qualitative method with case study type is used to answer this research question. The results of the study found that political parties, namely Gerindra and the United Development Party empowered their female cadres by providing political training and education as well as providing full space for female cadres to formulate policies and make activities through party wing organizations that specifically took care of women's needs.

**Keywords:** Empowerment, female cadres, political parties

### **PENDAHULUAN**

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender yang masih nampak senjang. Istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan (Shalihin & Firdaus, 2019). Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004:19).

Sebuah realitas yang berkembang, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, dunia politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki, baik secara representasi maupun kepentingan-kepentingan. Sehingga, menjadikan ruang untuk perempuan nyaman terlibat dalam dunia politik menjadi sulit. Di Indonesia sendiri kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik juga masih menjadi sebuah

tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, Indonesia sendiri berada di nomor 80 dari 156 negara yang ada di dalam Indeks Pembangunan Gender atau Gender Development Index (GDI) pada tahun 2007. Pada tahun 2009, angka ini merosot ke urutan 90, artinya perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki (Barri, 2010 : 1).

Perempuan dan politik memang menjadi suatu hal yang menarik untuk dibicarakan, karena keberadaan perempuan untuk ikut andil dalam ranah politik sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut.

*Affirmative action* kuota 30% tentang keterwakilan perempuan, senantiasa diperbaharui demi mencapai kesempurnaan dalam meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Pada pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pada pemilu 2014 *affirmative action* lebih ditekankan oleh Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang tata cara pencalonan anggota DPRD, yang memerintahkan kepada partai politik agar wajib memenuhi syarat kuota 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Partai yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka bakal calon di dapil yang tidak memenuhi syarat akan dicoret sebagai peserta pemilu. Ketentuan ini menempatkan perempuan pada posisi yang menguntungkan, karena dengan adanya aturan ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk duduk sebagai anggota legislative (Kertati, 2014).

Secara regulasi, perempuan sudah diberi ruang yang luas, namun realitasnya afirmasi kuota 30% itu sepertinya belum menempatkan perempuan pada posisi yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan kursi perempuan yang ada di DPRD Sumbar. Pada pemilu 2004 perempuan yang duduk di DPRD Sumbar hanya 5 orang dari 55 kursi yang tersedia. Pemilu 2009 jumlah perempuan yang terpilih sebanyak 7 orang dari 55 kursi yang ada. Sedangkan pada pemilu 2014 jumlah perempuan di DPRD Sumbar menurun menjadi 6 orang, padahal jumlah kursi di DPRD Sumbar bertambah menjadi 65 kursi. Pada pemilu tahun 2019, berdasarkan data yang didapat dari KPU Sumbar jumlah perempuan yang akan duduk di DPRD Sumbar periode 2019-2024 hanya 4 orang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan KPU Sumbar (KPU Provinsi Sumatera Barat, 2020).

Permasalahan mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji, karena melalui ranah tersebut perempuan dapat merepresentasikan aspirasinya. Kita mengetahui bahwa saat ini terdapat banyak kaum perempuan yang sudah memiliki kepedulian terhadap isu gender, kesejahteraan, pendidikan, maupun anti kekerasan. Namun kaum perempuan tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki tanpa adanya suatu wadah yang tepat. Wadah yang dimaksud dalam konteks ini adalah partai politik.

Melalui partai politik, kaum perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata di segala bidang khususnya dalam bidang politik, sehingga partai politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan partisipasi politik dan keterwakilan politik kaum perempuan. Maka dapat dipahami bahwa di sinilah definisi suatu partai politik yang dianggap sebagai wadah yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Banyaknya partai politik yang bermunculan tidak menjamin tingginya angka keterwakilan kaum perempuan dalam ranah politik, sehingga berimbas pada partai politik yang secara umum dijadikan sebagai kendaraan dalam mengikuti rangkaian pemilihan umum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partai politik di Indonesia masih belum siap dalam

memberdayakan kader perempuan, terbukti dengan masih minimnya pula posisi perempuan dalam jabatan strategis di partai politik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Dari berbagai partai politik yang ada di Sumatera Barat, penulis hanya memfokuskan penelitiannya terhadap dua partai yakni Gerindra dan PPP, karena Gerindra yang merupakan partai yang membawa nilai-nilai nasionalis di tengah masyarakat dan mendominasi di Sumatera Barat dengan jumlah kader dan pendukung yang cukup banyak, dan PPP yang merupakan partai yang membawa nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat dan kurang mendominasi. Kedua partai ini merupakan partai yang sama-sama berhasil membawa kader perempuannya untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

### **Teori Feminisme Liberal**

Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal dari David Marsh dan Gerry Stoker yang merupakan paham yang dibangun secara kritis atas pemikiran liberal, penekanan individu, rasionalitas, serta diperbarunya suatu institusi dan yang diperjuangkan adalah hak-hak kaum perempuan, baik dalam politik (suara pemilu), ekonomi maupun pendidikan. Teori ini lebih menekankan pada terciptanya suatu kebebasan dan kesetaraan yang bersifat rasionalitas. Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk yang rasional sehingga dianggap memiliki kemampuan dan hak yang sama. Permasalahan yang sering terjadi selama ini terletak pada kebijakan negara yang dianggap bias gender. Hal tersebut juga dikarenakan masih kuatnya maskulinitas di lembaga negara dan partai politik yang mengakibatkan terbelenggunya hak-hak kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi yang berakar dari tidak adanya hak sipil serta peluang pendidikan yang sama bagi perempuan. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menghambat akses perempuan dalam memperoleh kekuasaan maupun sebagai pembuat keputusan. Dengan adanya feminisme liberal diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan yang mendasar bagi kaum perempuan dalam menyampaikan aspirasi pemenuhan hak-hak sipil perempuan, sehingga keberadaannya menjadi setara dengan kaum laki-laki serta posisi kaum perempuan tidak lagi termarginalkan dalam segala aspek khususnya aspek politis. Oleh karena itu, kaum feminis liberal tertarik dalam meningkatkan status perempuan di seluruh dunia sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik serta mendapatkan akses pada kekuasaan yang setara dengan laki-laki.

### **Konsep Partai Politik**

Secara umum partai politik merupakan sarana yang dapat digunakan oleh warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara. Dengan kata lain, salah satu cara masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik adalah dengan ikut bergabung ke dalam partai politik sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kritik serta saran yang dapat ditujukan kepada pemerintah. Kondisi partai yang cenderung menjadikan perempuan sebagai kaum yang termarginalkan membuat oligarki semakin tumbuh subur dan mematahkan semangat perempuan dalam menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesetaraan melalui pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dapat diwujudkan melalui strategi partai dalam memperjuangkan hak perempuan.

### **Konsep Pemberdayaan dalam Partai Politik**

Saat ini kaum perempuan sangat penting untuk diberdayakan karena banyak yang memiliki kepedulian terhadap isu gender. Dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki, maka diperlukan adanya suatu wadah yang tepat yakni partai politik. Berawal dari partai politik, perempuan dapat menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan yang selama ini dianggap bias gender. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kemampuan atau cara suatu partai politik dalam menempatkan posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Baik melalui reformasi hukum yang berlaku dalam partai,

pembentukan divisi perempuan, peraturan internal partai maupun strategi yang ditawarkan pada perempuan ketika dihadapkan pada pemilihan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian merupakan suatu sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian sangat berpengaruh pada fokus dan pelaksanaan penelitian khususnya dalam pemilihan metode. Dengan pendekatan penelitian mengacu kepada perspektif peneliti melakukan penelitiannya (Afrizal, 2014: 11). Untuk melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian, menurut Taylor dan Bogdan (1984: 1) serta Muhadjir (2002: 3) metode penelitian sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bahasa lainnya metode penelitian cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian agar masalah penelitian terjawab. Metode penelitian memiliki makna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014: 12).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini cocok dan tepat untuk digunakan dalam menyatakan sudut pandang dalam melakukan penelitian, karena metode penelitian ini merupakan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13). Menurut Anggito dan Setiawan (2018: 8), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan pada latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan dalam partai politik di Provinsi Sumatera Barat khususnya partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Memilih informan peneliti memilih dan menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (mekanisme disengaja), yaitu sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140). Maka kriteria yang digunakan menggali informasi tentang proses pemberdayaan perempuan pada partai politik yang ada di lingkup provinsi Sumatera Barat tersebut meliputi pengurus dan kader perempuan dari partai politik yang berhasil dan yang tidak berhasil mengantarkan anggota perempuannya duduk di lembaga legislative DPRD Sumatera Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan perempuan dalam ranah perpolitikan merupakan suatu keharusan dalam demokrasi. Memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsive gender dan mendorong pemberdayaan perempuan. Aktor utama dalam melakukan pemberdayaan perempuan adalah partai politik. Sebab, partai politik merupakan sarana utama bagi kaum perempuan untuk dapat meraih jabatan terpilih dan pimpinan politik. Oleh karena itu, struktur, kebijakan praktek dan nilai partai politik memiliki dampak mendalam terkait tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik negara mereka.

Pemberdayaan perempuan dalam internal partai, khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender sudah dapat terlihat dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 yang mengamanahkan pada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian

maupun kepengurusan di tingkat pusat, serta aturan yang ada dalam Anggaran Dasar (AD/ART) partai tentang keterwakilan perempuan dalam internal partai sebagai pengurus. Hal ini bertujuan agar seyogyanya kehadiran perempuan dalam internal partai politik dapat memperkuat peranan partai politik dalam mewujudkan tujuan dari pada demokrasi, mengingat partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi itu sendiri.

Adapun beberapa paradigma baru yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem dan Kelembagaan Partai Politik tercermin dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi badan hukum khususnya yang berkaitan dengan syarat memiliki kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) huruf d).
2. Demokratisasi internal partai politik tercermin dalam Pasal 22 yang menentukan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis sesuai dengan AD dan ART.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik diatur secara rinci dalam Bab XV mengenai keuangan yang terdiri dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 39. Undang-undang menentukan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik dikelola melalui rekening kas umum partai politik dan pengurus partai politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran (Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3)). Selanjutnya dalam Pasal 37 ditentukan bahwa pengurus di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban dan pada Pasal 38 menentukan hasil pemeriksaan dan pengeluaran keuangan partai terbuka untuk diketahui masyarakat.
4. Peningkatan Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam UU No. 2 Tahun 2008. Pada UU ini, peningkatan kesetaraan gender dimulai dari Pasal 2 "Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan HAM. Kemudian Pasal 20 menentukan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.
5. Pendidikan Politi Partai politik menurut Pasal 31 melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan meningkatkan.

Uraian di atas terlihat bahwa salah satu paradigma yang sangat mendasar dalam UU No. 2 Tahun 2008 tersebut adalah bersifat emansipatif bagi perempuan Indonesia untuk peningkatan kesetaraan gender dalam dunia politik, sehingga diharapkan pemberdayaan kapasitas kader perempuan menjadi perhatian partai politik sehingga peran dan fungsi perempuan semakin berkembang dan menjadi romantika demokrasi Indonesia untuk membangun keseimbangan (*balanced*) politik antara laki-laki dan perempuan.

### **Pemberdayaan perempuan melalui organisasi sayap partai Pemberdayaan perempuan melalui organisasi sayap partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**

Semangat dalam UU Pemilu menempatkan kuota untuk partisipasi perempuan di legislatif sebesar 30%, membuat partai Gerindra melakukan upaya dalam menempatkan peran perempuan dalam banyak aspek dengan membidik potensi-potensi yang ada pada perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam organisasi internal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender dapat terlihat padap peran yang diberikan pada perempuan dalam internal partai, yang mana peran tersebut diharapkan mampu memberdayakan perempuan dalam internal Gerindra. Diantara

upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam Internal partai Gerindra adalah melalui peran organisasi sayap partai Gerindra, yakni Perempuan Indonesia Raya (PIRA).

Sisi kelembagaan pemberdayaan perempuan di Partai Gerindra sudah mempunyai wadah yaitu organisasi sayap Partai Gerindra, yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA). PIRA, organisasi sayap perempuan Partai Gerindra, berdiri tak lama setelah berdirinya Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. PIRA berdiri di Jakarta, 9 Oktober 2008, mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan sebagai warga bangsa, utamanya berpolitik praktis. Politik dalam kehidupan sehari-hari, bukan hal yang asing bagi perempuan. Tetapi, politik dalam jalur resmi dan terakreditasi dalam partai politik, masih langka untuk perempuan. Visi PIRA adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui gerakan perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari ekonomi kerakyatan, pendidikan, budaya, dan kesehatan dalam rangka kemandirian bangsa. Misi PIRA adalah menjalankannya dengan bergabung dalam Partai Gerindra. Separuh dari lebih 240 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Maka, jayanya Indonesia, juga ditentukan oleh andil para perempuan negeri ini. Perjalanan menuju bangsa yang berhasil, besar dan bermartabat, separuhnya terwujud lewat peran perempuan.

Organisasi Sayap Partai Gerindra DPD Sumbar, PIRA, mempunyai 2 fungsi, yang pertama berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Pendidikan politik oleh PIRA dijalankan sesuai kebijakan masing-masing sayap partai dan tidak dijadwalkan secara reguler pelaksanaannya. Pendidikan politik yang dijalankan oleh PIRA adalah pendidikan yang lebih pada bentuk-bentuk non-formal seperti mengikuti dan mengamati aktivitas politik keseharian Partai Gerindra atau berdiskusi dan duduk bersama anggota-anggota sayap membahas politik terkini. Yang kedua fungsinya sebagai penciptaan kader, keberadaan PIRA diharapkan melahirkan kader – kader perempuan yang mumpuni untuk dilibatkan dalam perpolitikan partai Gerindra, khususnya DPD Sumbar. Sayap partai dituntut menghasilkan kader sesuai kebutuhan partai, seperti pemenuhan 30 persen perempuan terhadap Partai Gerindra atau penciptaan kader - kader muda yang militan yang siap berkontribusi untuk partai.

### **Pemberdayaan perempuan melalui organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Pemberdayaan perempuan dalam internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), khususnya dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender dapat terlihat pada keterlibatan partai dalam mengukung program-program yang mengedepankan perempuan. Pada akhirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki organisasi sayap yang bernama Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Apabila tidak ada divisi perempuan dalam suatu partai, maka tidak akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran kaum perempuan, sehingga harus kaum perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri.

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan satu-satunya organisasi sayap partai yang dikhususkan untuk perempuan yang berada pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988. Dan seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), WPP juga berazaskan Islam sebagai dasarnya. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dibentuk untuk meningkatkan kualitas perempuan secara umum dan meningkatkan partisipasi kader perempuan PPP di dunia politik secara khususnya. Bahkan sebelum adanya WPP, PPP dianggap sudah memperhatikan perihal nasib kader perempuannya untuk bisa melenggang ke parlemen. Banyak program-program yang diadakan oleh Wanita Persatuan Pembangunan untuk mempersiapkan kader perempuan-perempuan yang berkualitas, seperti pelatihan Training of Trainers (TOT), Pelatihan kewirausahaan, Pengajian, Bakti sosial dan membantu menggalang dana untuk bencana, Pelatihan kaderisasi, dan workshop calon legislative perempuan se-Sumatera Barat. Semua kegiatan yang diadakan ini dilakukan oleh kader perempuan partai PPP melalui WPP untuk kader perempuan-perempuan yang berpartisipasi dalam mensukseskan PPP dalam kancah politik di Sumatera Barat.

### **Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik**

#### **Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik kader perempuan pada Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra)**

Dalam hal keterampilan atau pelatihan bagi para kader perempuan, PIRA juga sering mengadakan kegiatan yang berhubungan keperempuanan. Kegiatan ini dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi perempuan. Pendidikan politik bagi kader perempuan melalui PIRA tidak hanya seputar pendidikan politik saja, tapi juga perihal kegiatan pelatihan keterampilan menjahit dan memasak demi menjaga eksistensi sebagai pengurus keluarga. Di samping itu PIRA juga mengutus kadernya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga tertentu seperti kesbangpol perihal penambahan wawasan politik sebagai modal dasar untuk terjun didalam dunia politik. Diskusi terkait isu-isu politik sering dilakukan oleh kader perempuan Gerindra bersama pengurus atau bersama kader lainnya. Kemudian juga ada pelatihan politik perempuan di tingkat pusat yang diadakan dalam bentuk Rakernas yang oleh partai ditingkat pusat.

Kegiatan seputar pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Gerindra dilakukan secara berjenjang berupa latihan kepemimpinan dan bahasan topik seputar kenegaraan. Berdasarkan AD/ART pasal 15 ayat 3 terdapat strata kader partai Gerindra yang terdiri dari 5 tahapan yakni, kader penggerak, kader pratama, kader madya, kader utama, dan yang terakhir kader manggala. Strata kader tertinggi yakni kader manggala dan untuk mendapatkan kenaikan strata tersebut kader harus mengikuti pendidikan politik yang pada setiap jenjangnya terdapat muatan integritas dan manajemen konflik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Gerindra kepada kader partainya terutama kepada kader perempuan yakni pelatihan dan pementapan pemahaman.

#### **Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik kader perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Pendidikan politik untuk kader PPP dalam bentuk pelatihan-pelatihan di internal PPP. Pelatihan ini diadakan sesuai dengan jenjang yang dimiliki oleh masing-masing kader PPP. Pelatihan kader yang diberikan berlaku untuk semua kader, tidak hanya untuk kader perempuan saja, tapi juga untuk kader laki-laki. Adapun jenjang yang dimaksud bersarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan melalui tahapan di bawah ini, yaitu:

1. Pertama penerimaan dan orientasi ditingkat kecamatan atau ranting, yaitu menjelaskan pemahaman kepada calon-calon yang akan dikader, apa sebenarnya PPP dan misinya, serta anggaran dasar partai.
2. Selanjutnya ditingkat daerah itu namanya LKKD, latihan kepemimpinan kader dasar. Untuk kader baru yang akan dijadikan pengurus di tingkat ranting dan atau jadi pengurus di sayap-sayap partai.
3. Setelah itu masuk kepada tingkat wilayah namanya LKKM latihan kader pemimpin madya, untuk seluruh pengurus partai di tingkat kecamatan dan cabang.
4. Selanjutnya tingkat pusat namanya LKKU latihan kader kepemimpinan utama untuk pengurus wilayah dan pengurus pusat yang berorientasi kepada persiapan menjadi pimpinan partai ditingkat cabang, wilayah dan pusat.
5. TOT untuk pengurus harian partai dalam rangka memperbanyak tenaga instruktur atau fasilitator yang akan bertugas menjadi pelatih ditingkat pelatihan dan lanjutan.

Adapun materi pangkaderan yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan, untuk tahap pertama atau orientasi lebih menjelaskan tentang pengenalan terhadap partai, seperti apa sebenarnya partai PPP, visi, misi partai, anggaran dasar partai, pemahaman arti organisasi, menanamkan loyalitas terhadap organisasi, dan menetapkan dedikasi. Untuk tingkat selanjutnya materi pengkaderan lebih pendalaman terhadap partai, membuka wawasan berpikir yang berdasarkan ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, mau dibawa kemana partai ini, tanggung jawab sosial, dan seperti materi pengkaderan pada umumnya menanamkan rasa cinta tanah air, untuk tahapan yang lebih tinggi yaitu, membentuk sumber insani organisasi yang memiliki.

## KESIMPULAN

Partai politik merupakan sarana atau wadah bagi kaum perempuan agar dapat memperjuangkan kepentingannya secara nyata di segala bidang khususnya dalam bidang politik, sehingga partai politik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan partisipasi politik dan keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislative. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative tentu tidak terlepas dari upaya partai politik dalam memberdayakan kader perempuannya. Pemberdayaan perempuan dalam ranah perpolitikan merupakan suatu keharusan dalam demokrasi. Memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsive gender dan mendorong pemberdayaan perempuan. Aktor utama dalam melakukan pemberdayaan perempuan adalah partai politik. Sebab, partai politik merupakan sarana utama bagi kaum perempuan untuk dapat meraih jabatan terpilih dan pimpinan politik. Partai politik seperti Gerindra dan PPP merupakan dua dari sekian banyak partai yang memberikan ruang bagi kader perempuannya sebagai upaya dari memberdayakan kader perempuan. Gerindra yang merupakan partai yang membawa nilai-nilai nasionalis ditengah masyarakat dan mendominasi di Sumatera Barat dengan jumlah kader dan pendukung yang cukup banyak, dan PPP yang merupakan partai yang membawa nilai-nilai keislaman ditengah masyarakat namun kurang mendominasi. Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan memberdayakan kader perempuannya dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan politik serta memberikan ruang penuh bagi kader perempuan untuk merumuskan kebijakan dan membuat kegiatan melalui organisasi sayap partai yang khusus mengurus kebutuhan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014a). *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)* (p. 144). PT Raja Grafindo Persada.
- Barri, Farzana. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Jogjakarta: Liberty
- Bogdan & Taylor. (1984). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Diterbitkan oleh Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin
- Rahmawati, A (2004). Persepsi Remaja tentang Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya. Skripsi pada Jurusan Pendidikan dan Bimbingan UPI Bandung
- Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019). Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109–140. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366>
- Kertati, Indra. 2014, "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen" ; *Jurnal Riptek* Vol.8 No.1.2014,19-32.p-ISSN:1978-8320. e-ISSN:2716-3482
- KPU. Komisi Pemilihan Umum. 2019. *Daftar anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024*. Sumatera Barat: Komisi Pemilihan Umum
- UU No. 2 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 31 Tahun 2002